

ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) PENDERITA HIPERTENSI DI PUSKESMAS KOTA PALANGKA RAYA

Feronika Adithia Eka Asi¹, Antono Suryoputro², Budiyo³
¹⁻³Magister Kesehatan Masyarakat, Universitas Diponegoro
Email: feronikaeka18@students.undip.ac.id

ABSTRAK

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan penyakit kelainan jantung dan pembuluh darah yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah. Hipertensi merupakan salah satu indikator SPM Bidang Kesehatan Kota Palangka Raya yang belum mencapai target standar pelayanan minimal yaitu hanya 57,27% dari target 100%. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi kebijakan SPM penderita Hipertensi di puskesmas kota di Palangka Raya. Jenis penelitian adalah metode kualitatif deskriptif dengan indepth interview dengan informan penelitian Koordinator pemegang program Hipertensi, kepala puskesmas dan pemegang program PTM bagian Hipertensi DKK Palangka Raya yang dilakukan pada bulan November-Januari 2022. Hasil penelitian diketahui bahwa dalam pelaksanaan layanan sesuai SPM penderita Hipertensi masih belum optimal, minimnya koordinasi dari pihak dinas dan puskesmas mengenai kebijakan SPM, dan masih sebagian sasaran yang tidak melakukan pengobatan hipertensi secara rutin ke Puskesmas, tenaga Kesehatan di puskesmas yang memiliki tugas ganda diluar kegiatan khusus Hipertensi sebagai petugas vaksin selama masa pandemi Covid-19. Peneliti memberikan saran agar puskesmas mengadakan sosialisasi kepada petugas Kesehatan mengenai pedoman Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan sehingga seluruh petugas Kesehatan tidak hanya mengetahui namun juga memahami masing-masing indikator beserta langkah-langkah pelayanannya terkhususnya bagi pemegang program dan melakukan edukasi dengan lebih optimal lagi kepada pasien Hipertensi agar pasien lebih paham dengan penyakit yang dideritanya. Dinas Kesehatan diharapkan dapat membangun komunikasi yang lebih baik lagi dengan pihak puskesmas agar tercapainya standar pelayanan minimal penderita Hipertensi dan Dinkes rutin memonitoring dan evaluasi kepada seluruh puskesmas di Kota Palangka Raya mengenai capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dicapai oleh Puskesmas, untuk menghindari pemahaman data yang berbeda antara puskesmas dan dinas kesehatan.

Kata Kunci : Hipertensi, SPM, Kebijakan, Implementasi

ABSTRACT

Hypertension, also known as high blood pressure, is a heart and blood vessels condition characterized by increased blood pressure. Hypertension is one of the SPM indicators for the Palangka Raya City Healthcare that has not yet reached the minimum service standards target, reaching only 57.27% of the supposed 100%. The purpose of this study is to analyze the implementation of SPM policy for patients with hypertension at Palangka Raya City Health Centre. The method

of this study is qualitative descriptive method using in-depth interview with researcher informants; Hypertension Program Coordinator, chairperson of City Health Centre, and MSS Hypertension Program holder in Palangka Raya City Health Department. The interviews were carried out in November-January 2022. The result of this study is the aforementioned issue of the unsatisfactory service conducted in accordance with SPM hypertension indicator, the lack of coordination between health officials and city health center regarding SPM policy, there are still some patients not routinely treating their hypertension at the city health center, the medical workers at the city health center who worked double jobs as vaccinators outside their special handling of hypertension during COVID-19 pandemic. The researcher suggests the city health center to socialize with medical workers regarding the guidelines of Minimum Service Standard so that not only the workers acknowledge but also comprehend each of the indicators and their extra steps of the service particularly for the program holders, and administer a more optimal education towards the hypertension patients for the sake of their disease awareness. It is expected for the health officials to improve their communications with city health center so that the minimum service standard for hypertension patients can be achieved, and the health officials should routinely monitor and evaluate all of the health centers in Palang Karaya City regarding the requirements of minimum service standards (MSS) that should be achieved by city health centers, to avoid mutual data misconceptions among the city centre and health officials.

Keywords: Hypertension, MSS, Policy, Implementation.

LATAR BELAKANG

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan peningkatan tekanan darah sistolik ≥ 140 mmHg atau tekanan darah diastolik ≥ 90 mmHg.[1] Secara umum, hipertensi merupakan suatu keadaan tanpa gejala, yaitu dimana tekanan yang abnormal tinggi di dalam arteri yang menyebabkan resiko terhadap stroke, gagal jantung, kerusakan ginjal dan serangan jantung.[2]

Prevalensi Hipertensi di Indonesia masih cukup tinggi. Hasil Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018 menyatakan bahwa di Indonesia penderita Hipertensi sebesar 34,1%. Ini mengalami peningkatan dibandingkan presentase hasil RISKESDAS 2013 yaitu sebesar 25,8%.[3]

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Peraturan teknis terkait dengan SPM tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Walaupun peraturan teknis masih relatif baru terbentuk pada tahun 2019, namun pelaksanaan pelayanan kesehatan yang tercantum dalam pasal 2 peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 4 tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan sudah dilakukan pemerintah daerah. Hanya saja untuk peraturan ini ditetapkan capaian dan target yang lebih terukur.[4] Standar Pelayanan Minimal (SPM) dianggap sangat penting untuk dilaksanakan, dikarenakan dengan adanya SPM seluruh wilayah atau daerah diberikan petunjuk serta arahan terkait pelayanan secara bersamaan, kemudian SPM diharapkan mampu menjadi indikator dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga taraf hidup masyarakat akan membaik pula.[4]

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada seluruh

penderita hipertensi sebagai upaya pencegahan sekunder di wilayah kerjanya. Setiap penderita hipertensi mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar yaitu 100%. Pelayanan Kesehatan hipertensi sesuai standar yaitu menerapkan pemeriksaan dan monitoring tekanan darah, edukasi, pengaturan diet seimbang, aktifitas fisik dan pengelolaan farmakologis.[5] Meskipun sudah menerapkan pelayanan Kesehatan sesuai standar tersebut, namun kenyataannya hingga saat ini cakupan pelayanan bagi penderita Hipertensi masih belum ada satupun kabupaten/kota yang mampu mencapai target dan memenuhi seluruh kebutuhan populasi, dikarenakan gambaran epidemiologi di setiap wilayah berbeda-beda.[6]

Penerapan SPM bidang Kesehatan di Provinsi Kalimantan Tengah juga belum memenuhi standar target yang ditetapkan dimana cakupannya hanya sebesar 43,3% tahun 2019.[7] Pelayanan sesuai standar bagi penderita Hipertensi di Puskesmas Kota Palangka Raya pada tahun 2019 mencapai angka 27.639 pada usia ≥ 15 tahun dan hanya sebesar 57,2% yang mendapatkan pelayanan Kesehatan. Angka tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan hasil Profil Kesehatan Kota Palangka Raya 2018 dimana angka penderita Hipertensi mencapai 47.664 pada usia ≥ 15 tahun dan yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar hanya 28,7%.[8]

Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penderita Hipertensi masih memiliki beberapa hambatan dan tantangan. Sebagai contoh kendala dalam pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) disuatu daerah diantaranya diakibatkan oleh Sumber daya Manusia (SDM) penyusun anggaran yang kurang dalam memahami indikator capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) hingga sumber daya berupa tenaga kesehatan di Puskesmas masih kurang.[9] Selain masalah SDM, jumlah anggaran yang kurang dalam mendukung ketercapaian SPM serta lemahnya pelaksanaan evaluasi terhadap capaian SPM dianggap sebagai masalah capaian SPM tidak memuaskan.[9] Hasil penelitian oleh Kuzairi

(2017) menunjukkan bahwa kendala pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Puskesmas yang belum memenuhi target capaian adalah terutama karena adanya ego sektoral. Mereka menggapai tidak ada komunikasi dan Kerjasama yang memadai antara para petugas Kesehatan dan para petugas Dinas Kesehatan dalam mencatat dan melaporkan capaian SPM.[10]

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, jumlah puskesmas di Kota Palangka Raya sebanyak 11 puskesmas, dari 11 puskesmas tersebut 3 yang memiliki persentase terendah dalam capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi penderita Hipertensi yaitu Puskesmas Bukit Hindu (26,5%), Puskesmas Marina Permai (32,4%) dan Puskesmas Tangkiling (49,2%). Puskesmas tersebut merupakan unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan Kesehatan suatu wilayah kerja. Puskesmas dan jaringannya merupakan ujung tombak Dinkes dalam upaya mewujudkan target Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota.[11] Dengan demikian perlu dilakukan Analisis Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penderita Hipertensi di Puskesmas Kota Palangka Raya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Dengan pendekatan kualitatif, dilakukan secara studi kasus. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan observasi. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan telaah dokumen Laporan Capaian Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Kota Palangka Raya tahun 2019. Sumber data primer didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan peneliti kepada informan sebagai subjek penelitian. Penelitian dilakukan di 3 Puskesmas, Puskesmas Bukit Hindu, Puskesmas Marina Permai, dan Puskesmas Tangiling. Terdapat 3 informan utama dan 4 informan triangulasi. Subjek

penelitian ini ialah orang-orang yang berkaitan dengan pelaksanaan pelayanan Kesehatan di Puskesmas. Informan utama penelitian ini adalah penanggung jawab program Hipertensi dari masing-masing puskesmas yang berjumlah 3 orang. Informan triangulasi penelitian ini adalah 3 orang kepala puskesmas dan 1 orang penanggung jawab PTM DKK Kota Palangka Raya. Subjek penelitian dipilih berdasarkan hasil capaian SPM Hipertensi yang presentasenya paling rendah.

Instrumen dalam pelaksanaan penelitian ini adalah peneliti sendiri dengan menggunakan pedoman wawancara mendalam dan observasi dengan instrument tambahan, yaitu alat perekam dengan menggunakan handphone dan alat tulis sebagai dokumentasi hasil wawancara dengan informan. Teknik Pengolahan dan Analisa data dalam penelitian ini bersifat deskriptif yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat dan membandingkan antara data yang diperoleh melalui hasil wawancara, observasi dan telaah dokumen, yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi/penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Informan

Informan utama dalam penelitian inii terdiri koordinator pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi dari masing-masing puskesmas yaitu Puskesmas Bukit Hindu, Puskesmas Marina Permai dan Puskesmas Tangkiling, serta terdapat informan triangulasi terdiri dari kepala puskesmas sebagai supervisor dan koordinator PTM bagian hipertensi DKK Palangka Raya. Informan triangulasi terpilih adaah informan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan Kesehatan di Puskesmas Kota Palangka Raya.

Tabel 1. Karakteristik Informan Penelitian

| No | Informan | Kode | Umur (th) | Masa Kerja | Peran dalam capaian SPM |
|----|-----------------------|------|-----------|------------|-------------------------|
| 1 | Programmer Hipertensi | IU1 | 38 th | 13 tahun | Penanggung |

| No | Informan | Kode | Umur (th) | Masa Kerja | Peran dalam capaian SPM |
|----|---|------|-----------|------------|--------------------------|
| | (Puskesmas Bukit Hindu) | | | | jawab program |
| 2 | Programmer Hipertensi (Puskesmas Marina Permai) | IU2 | 39 th | 12 tahun | Penanggung jawab program |
| 3 | Programmer Hipertensi (Puskesmas Tangkiling) | IU3 | 36 th | 15 tahun | Penanggung jawab program |
| 4 | Kepala Puskesmas Bukit Hindu | ITK1 | 43 th | 1 tahun | Supervisor |
| 5 | Kepala Puskesmas Marina Permai | ITK2 | 54 th | 2 tahun | Supervisor |
| 6 | Kepala Puskesmas Tangkiling | ITK3 | 46 th | 9 tahun | Supervisor |
| 7 | Programmer pengelola PTM | ITK4 | 42 th | 8 tahun | Pengelola program |

Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan bagi penderita Hipertensi di Puskesmas Kota Palangka Raya

Dalam memberikan pelayanan kesehatan yang minimal kepada masyarakat terkhususnya kepada penderita Hipertensi telah diatur dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM). Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar minimal yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara. Fungsi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yaitu memfasilitasi pemerintah untuk melakukan pelayanan publik dengan tepat bagi masyarakat dan juga sebagai instrument bagi masyarakat dalam melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah dalam pelayanan publik bidang kesehatan. [12]

Dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) disusun tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan ditingkat Provinsi/Kota/Kabupaten sebagai acuan bagi pemerintah daerah dengan memperhatikan kemampuan serta potensi daerah. Standar Pelayanan Minimal (SPM) juga akan berfungsi sebagai perangkat yang dapat menampilkan gambaran aliran dana yang masuk ke sector Kesehatan

serta dalam pendistribusiannya hingga penggunaannya, sehingga dapat memberikan rekomendasi pembiayaan Kesehatan bagi penentu kebijakan di bidang Kesehatan. Didalam Undang- Undang nomor 23 tahun 2014 juga mendelegasikan pada pemerintah daerah untuk fokus memprioritaskan belanja daerah untuk mendanai urusan pemerintah yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pasal 298.[13] Penatalaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penderita Hipertensi di Puskesmas Bukit Hindu, Marina Permai dan Tangkiling sudah sesuai dengan tahapan maupun indikator yang ada dalam Permenkes no 4 tahun 2019 yaitu tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang meliputi pendataan penderita Hipertensi, deteksi awal penderita, pelayanan Kesehatan sesuai standar berupa pemeriksaan tekanan darah, pemberian edukasi serta terafi farmakologi, pelaksanaan rujukan, pengadaan obat dan peralatan, pelaporan dan pencatatan, serta monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penderita Hipertensi di Puskesmas Kota Palangka Raya sudah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, hanya saja dalam penerapannya di Puskesmas belum sepenuhnya dilaksanakan, dikarenakan belum meratanya pembagian penduduk yang harus berobat di Puskesmas serta susah nya menjangring masyarakat yang memiliki penyakit Hipertensi dan juga dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana dan Disposisi

Faktor-Faktor penghambat Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) penderita Hipertensi di Puskesmas Kota Palangka Raya

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa ada beberapa indicator yang berpengaruh dalam capaian target SPM yaitu SDM. Sumber Daya Manusia yang belum memadai yaitu kurangnya petugas Kesehatan seperti perawat, bidan dan dokter, terlebih dimasa pandemi Covid-19 membuat petugas Kesehatan memiliki tugas ganda yaitu

menjadi petugas vaksin, sehingga mempengaruhi kinerja dalam kegiatan layanan penderita hipertensi. Sumber Daya Manusia mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan di Puskesmas. seluruh informan utama menyatakan bahwa ketersediaan SDM masih kurang, dikarenakan pandemi covid-19.

...”kalau ngomong sumber daya pasti kurang ya, karena kita tenaga kesehatannya kurang, dan lagi masa pandemi banyak juga kegiatan luar yang berhubungan dengan pandemi, jadi masih belum bisa maksimal lah”...(IU1)

...”kurang mba, apalagi masa pandemi ini tugas nya terbagi bagi...”(IU2)

Seluruh informan triangulasi menyatakan bahwa sumber daya dalam penerapan standar pelayanan minimal di bidang Kesehatan pada indikator pelayanan Kesehatan penderita hipertensi sudah tercukupi, namun pada masa pandemi Covid-19 tugas petugas Kesehatan menjadi terbagi-bagi, sehingga petugas yang tersisa perlu mengisi kekosongan petugas Kesehatan tersebut. Hal tersebut yang membuat pihak puskesmas merasa sumber daya manusia yang ada masih belum tercukupi. Mengenai kemampuan petugas kesehatan dalam memberikan layanan sesuai standar, seluruh informan utama menyatakan bahwa semua petugas kesehatan sudah cukup baik dalam melakukan tugasnya.

...”untuk kemampuan dari petugas kesehatannya sudah cukup baik mba dalam menjalankan tugasnya...”(IU1)

...”sudah bagus mba...”(IU3)

Kemampuan petugas Kesehatan sangat berpengaruh dalam pelaksanaan kegiatan layanan kesehatan. Karyawan yang memiliki keterampilan yang baik dibidang tugasnya akan dapat melaksanakan tugas yang diberikan walaupun tugas tersebut tidak sesuai dengan keinginannya. Hal ini sejalan dengan penelitian Iqbal (2017) yang menyatakan bahwa penguasaan tugas dalam setiap pekerjaan yang

diberikan akan mampu menjadikan seorang karyawan lebih menekuni tugas dan dapat membantu mempercepat target kerja.[14]

Selain faktor sumber daya manusia ada juga faktor yang menghambat proses kegiatan pelayanan Kesehatan bagi penderita Hipertensi yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan Prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan kegiatan layanan bagi penderita hipertensi sesuai standar. Sarana dan Prasarana yang baik diharapkan akan dapat meningkatkan produktivitas kerja petugasnya, ketika produktivitas petugas Kesehatan telah tercapai maka organisasi dapat mengukur sejauh mana peningkatan produktivitas kerja yang mereka capai.

...kalau untuk peralatan kesehatan kami ada tetapi juga kadang tidak ada contohnya harus berkegiatan yang mobile kadang masih kesulitan sarana prasarana karena jumlahnya terbatas jadi kami berkegiatan bentrok tanggal dikegiatan itu bisa saja kita kekurangan peralatan...(IU1)

... petugas kami dilengkapi dengan peralatan memang ada peralatan yang sudah tidak layak pakai karena rusak. Dari segi obat-obatan dinas mencukupi obat-obatan hipertensi bagi masyarakat...(IU3)

Penelitian Edi menunjukkan bahwa sarana prasarana pelayanan Kesehatan yang didukung dengan kualitas pelayanan yang baik niscaya akan mewujudkan kepuasan atas pelayanan yang diharapkan oleh pengguna layanan Kesehatan dalam hal ini adalah masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Kota Palangka Raya.

Hambatan lain yang menjadi penyebab belum tercapainya target SPM adalah Disposisi. Keterlibatan stakeholders sangat penting dalam mendukung keberhasilan implementasi suatu kebijakan di organisasi Puskesmas. Informan utama menyatakan bahwa layanan Kesehatan bagi penderita Hipertensi sudah berjalan, namun belum berjalan dengan optimal dikarenakan petugas Kesehatan masih sulit untuk menjangkau masyarakat yang menderita Hipertensi. Hal ini ditunjukkan dalam narasi yang diungkapkan oleh informan berikut :

...”untuk pelayanan kesehatan bagi penderita Hipertensi sendiri sejauh ini berjalan seperti biasa hanya saja kesulitannya adalah puskesmas kami masih kesulitan untuk menjangkau peserta terlebih lagi ada masyarakat yang Ketika kami beritahukan untuk konsultasi ke Puskesmas kami, namun masyarakat malah berobat ke Puskesmas lain maupun ke dokter praktek dikarenakan kepesertaan BPJS nya disana...”(IU2)

...” belum optimalnya SPM penderita hipertensi , karena petugas kami masih kesulitan dalam menjangkau masyarakat untuk berobat di Puskesmas kami, karena pembagian wilayah untuk berobat di puskesmas kami juga belum merata...” (ITK3)

Ungkapan informan utama diatas juga didukung oleh informan triangulasi, hal tersebut ditunjukkan dalam narasi yang diungkapkan oleh informan berikut :

Narasi diatas menunjukkan bahwa kinerja puskesmas dalam upaya pencapaian SPM sesuai target kurang optimal dan juga kurangnya kesadaran dari masyarakat dalam berobat di Puskesmas. Diposisi merupakan salah satu faktor yang memiliki dampak penting dalam implementasi kebijakan. Jika pelaksana memiliki kecenderungan atau sikap positif akan adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat kemungkinan besar implementasi kebijakan akan terlaksana dengan baik. Demikian juga sebaliknya, jika pelaksana bersikap negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena konflik kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang serius. Dengan kata lain, jika pengawasan dilakukan dengan baik maka kebijakan akan berjalan dengan baik, sebaliknya jika tidak dilakukan pengawasan maka kebijakan tidak akan berjalan dengan baik.

Selain itu untuk kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini juga perlu diperbaiki agar dapat meningkatkan kualitas kinerja pelayanan Kesehatan. Menurut penelitian Tarigan, Pengembangan sumber daya manusia, baik kuantitatif maupun kualitatif, berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Maka dalam hal ini, kuantitas dan

kualitas sumber daya manusia sangat penting untuk meningkatkan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.[15]

Hambatan lain yang berkaitan dengan capaian target SPM bagi penderita Hipertensi di Puskesmas Kota Palangka Raya adalah kurangnya pelatihan bagi petugas Kesehatan terkhususnya untuk semua programmer. Pelatihan adalah bagian dari prinsip dan digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja karyawan untuk meningkatkan efisiensi. Petugas kesehatan yang mengikuti pelatihan dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan kepada kepada pasien. Kemampuan tersebut mencakup pemahaman tentang tugas yang menjadi tanggung jawabnya.[16] . Pelatihan yang dilaksanakan dengan baik dapat membantu meningkatkan kinerja, yang juga akan sangat berdampak pada upaya tim untuk memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam Permenkes No. 4. Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis SPM.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) penderita Hipertensi di Puskesmas Kota Palangka Raya sudah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah, hanya saja dalam penerapannya di Puskesmas belum sepenuhnya dilaksanakan, hal ini disebabkan terdapat beberapa indikator yaitu SDM, Sarana dan Prasarana dan Disposisi.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi di Puskesmas Kota Palangka Raya, salah satunya adalah masalah sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia (SDM) di Puskesmas Kota Palangka Raya masih belum terpenuhi yaitu kurangnya petugas kesehatan seperti perawat, bidan dan dokter, terlebih dimasa pandemi Covid-19 membuat petugas Kesehatan memiliki tugas ganda yaitu menjadi petugas vaksin, sehingga

mempengaruhi kinerja dalam kegiatan layanan penderita hipertensi, Terlebih wilayah demografi yang luas juga berpengaruh terhadap sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga dalam hal ini sarana dan prasarana yang tersedia dapat dikatakan kurang mengingat wilayah kerja puskesmas yang luas serta pembagian wilayah kerja yang tidak merata di Puskesmas lain.

Saran

Puskesmas dapat mengadakan monitoring dan evaluasi secara rutin serta menyeluruh. Hal tersebut perlu dilakukan agar dapat meningkatkan kinerja petugas pelayanan kesehatan serta meningkatkan pemahaman petugas terhadap capaian SPM yang ditetapkan pemerintah. Hal tersebut perlu dilakukan dalam rangka untuk meningkatkan kinerja petugas pelayanan, serta menjaga kepatuhan petugas terhadap capaian SPM yang ditetapkan. Kepala puskesmas harus dapat memberikan pemahaman, serta menyusun langkah strategis agar dapat membawa puskesmas untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kurangnya sumber daya manusia serta sarana dan prasarana mempengaruhi kinerja petugas kesehatan sehingga programmer memiliki beban kerja, oleh karena itu perlu adanya usulan dari puskesmas ke dinas Kesehatan dalam hal penambahan sumber daya manusia.

DAFTAR PUSTAKA

1. WHO.Hypertension [Internet].2021 [cited 2022 Maret 20]. Available from: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension#>
2. Kementerian Kesehatan RI. Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI 2014. Jakarta; 2014.
3. Kementerian Kesehatan RI. Riset Kesehatan Dasar 2018. Jakarta;2018.
4. Yulia Astri Nurul A. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Kasus Hipertensi dan Diabetes Mellitus di Kota Bandung Tahun 2020.Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja. Vol:46 No:2. 2020
5. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Jakarta.

6. Isnia Nur Maula. Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Penderita Hipertensi di UPTD Puskesmas Mayong I Kabupaten Jepara. Universitas Negeri Semarang.2019.
7. Profil Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah.2019
8. Profil Kesehatan Kota Palangka Raya. Kalimantan Tengah. 2019.
9. Jaswin, E. Basri. Implementasi Penganggaran Berbasis Kinerja Dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penyelenggara Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam. 284-299.
10. Kuzairi,U. Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada Pelayanan Publik Bidang Kesehatan (Studi Kasus Pada Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Bondowoso).Jurnal Politico.Vol:17.No:184-205.
11. Windy N. Tumuwe. Analisis Implementasi Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Puskesmas Ondong Siau Barat Kabupaten Sitaro.Universitas Sam Ratulangi.2018.
12. Permenkes No 04 tahun 2019.Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.2019.
13. Undang-Undang No.23 tahun 2014. Pemerinta Daerah.2014.
14. Fahlevi MI, Masyarakat FK, Umar UT, Kunci K. Pengaruh kompetensi petugas terhadap kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas Peureumeue Kabupaten Aceh Barat. Pros Semin Nas IKAKESMADA. 2017:256-65.
15. Tarigan CG, Nasution MA. Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN Cabang Binjai. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area. 2014 Dec 8;2(2):146-53.
16. Simamora RH, Bukit E, Purba JM, Siahaan J. Penguatan kinerja perawat dalam pemberian asuhan keperawatan melalui pelatihan ronde keperawatan di rumah sakit royal prima medan. Jurnal pengabdian kepada masyarakat. 2017;23(2):300-4.